

DINAMIKA SOSIAL-POLITIK KESULTANAN JAILOLO (2002 – 2017)

Mustafa Mansur¹

Rusli M. Said²

Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Khairun^{1,2}

Pos-el: Mustafa.mansur8@gmail.com¹

Abstrak

Kesultanan Jailolo merupakan salah satu dari empat pilar pranata tradisional Maluku yang dikenal dengan Moloku Kie Raha. Kesultanan ini telah dianeksasi oleh Kesultanan Ternate sejak 1620, dan dibangkitkan kembali oleh Sultan Nuku dari Tidore pada 1796. Sejak 1825, Kesultanan Jailolo ini pernah berkedudukan di Pulau Seram hingga dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada 1832. Sejak saat itu, tidak lagi berkedudukan seorang sultan baik di Jailolo Halmahera maupun di Seram. Pada 2002, Kesultanan Jailolo dihidupkan kembali untuk melengkapi kesempurnaan Moloku Kie Raha. Namun, kehadiran Kesultanan Jailolo dari 2002 hingga 2017, mengalami kontroversi berkaitan dengan hubungan geneologis sultan yang menyebabkan Kesultanan Jailolo berada pada pusaran politik internal. Penelitian ini membahas bagaimana pusaran politik itu membentuk dinamika sosial-politik dari 2002 sampai 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik tersebut telah melahirkan terbentuknya dua kelompok masyarakat adat di Jailolo sebagai pendukungnya dalam membangun solidaritas emosional dan sosial untuk mempertahankan legitimasi yang mereka yakini sebagai kebenaran. Terdapat setidaknya empat orang sultan pada 2002 sampai 2017 yang masing-masing mengklaim memiliki hubungan geneologis dengan sultan-sultan Jailolo terdahulu. Dinamika tersebut menggambarkan fenomena yang relatif sama dengan dinamika politik pada masa kolonial.

Kata Kunci : *Jailolo, sultan, dinamika sosial-politik*

A. PENGANTAR

Jailolo dalam perspektif sejarah dan sistem politik tradisional merupakan salah satu kesultanan di Maluku Utara yang terkonfigurasi dalam kesatuan Moloku Kie Raha. Istilah Moloku Kie Raha menggambarkan empat otoritas dunia Maluku, yakni: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo (Amal, 2007: 60-62; Djafaar, 2007: 33-37). Selain itu, ada juga Kerajaan Loloda dan Kerajaan Moro yang tidak terkonfigurasi dalam kesatuan Moloku Kie Raha (Amal, 2007: 203; Kusnanto dkk, 2010: 76; Mansur, 2013: 63).

Istilah Moloku Kie Raha sudah sangat membumi di masyarakat Maluku Utara. Setidaknya hal ini tergambar dari memori kolektif masyarakat di Maluku Utara yang diabadikan dalam pribahasa lokal (tradisi lisan) dan salah satu lagu

daerah yang berjudul “Moloku Kie Raha Yoma Fato-Fato”. Lagu Moloku Kie Raha ini menggambarkan kesatuan empat kesultanan yang disebutkan di atas, di mana pesan penting yang terdapat dalam lagu tersebut adalah pentingnya persatuan dan persaudaraan dari empat kesultanan, karena dengan persatuan itu membuat persaudaraan empat kesultanan akan menjadi kuat. Dalam bahasa Ternate, persatuan dan persaudaraan itu dipatrikan dengan semboyan “Marimoi Ngone Foturu” yang berarti “bersatu kita kuat”.

Sebutan Moloku Kie Raha di atas terkesan hanya menjadi nostalgia masa lalu dan tidak menggambarkan kontinuitas sejarah di masa kini. Kondisi ini dapat diamati dari keberadaan institusi kesultanan Moloku Kie Raha tersebut, hanya Kesultanan Ternate yang eksis. Sementara Kesultanan Tidore pasca wafatnya Sultan Zainal Abidin Sjah pada 1967 mulai vakum. Demikian juga dengan Kesultanan Bacan mengalami kevakuman setelah wafatnya Sultan Dede Muksin Usman Sjah pada 1983. Adapun Kesultanan Jailolo telah dianeksasi oleh Kesultanan Ternate sejak 1620 (Amal, 2007: 36).

Setelah gerakan reformasi 1998, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Bacan pun dihidupkan kembali, seolah memberi kesan bahwa reformasi telah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya institusi-institusi adat termasuk institusi kesultanan. Ruang reformasi itu rupanya memungkinkan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo yang menjadi bagian dari pilar Moloku Kie Raha.

Dengan semangat “Marimoi Ngone Futuru”, Jailolo sebagai bagian dari pilar Moloku Kie Raha akhirnya dihidupkan kembali pada 2002. Dengan hadirnya Kesultanan Jailolo, maka lengkaplah konfigurasi Moloku Kie Raha yang terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Akan tetapi, eksisnya kembali Kesultanan Jailolo melahirkan dinamika tersendiri terhadap perkembangan institusi dan masyarakatnya. Kondisi ini dapat diamati dari adanya kontroversi mengenai hubungan geneologis sultan, pengangkatan dan pemberhentian sultan, dan perangkat kesultanan dari 2002 sampai 2017.

Pada periode yang disebutkan di atas, setidaknya terdapat empat sultan di Jailolo dengan pendukungnya masing-masing. Keempat sultan itu adalah Abdullah Sjah, Ilham Dano Toka, Muhammad Siddik Kautjil Sjah, dan Ahmad

Abdullah Sjah. Dari amatan yang telah dilakukan, dari keempat sultan tersebut, terdapat dua versi yang saling mengklaim kepemilikan atas singgasana Kesultanan Jailolo.

Dengan realitas sosial dan politik di atas, maka kajian ini mengambil batasan temporal dari 2002 sampai 2017. Tahun 2002 mengacu pada pertimbangan bahwa pada tahun ini Kesultanan Jailolo dihidupkan kembali, sedangkan tahun 2017 menggambarkan masih berkembangnya dinamika politik internal Kesultanan Jailolo dengan dua versi sebagaimana yang disebutkan di atas.

Adapun masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah (1) bagaimana status Jailolo sebelum 2002; (2) bagaimana dinamika sosial-politik Kesultanan Jailolo dari 2002 sampai 2017; dan bagaimana hubungan geneologis para Sultan Jailolo dari 2002 sampai 2017?

Berdasarkan masalah di atas, maka kajian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan. Menarik karena eksisnya kembali Kesultanan Jailolo di masa kini menggambarkan adanya fenomena sosial-politik di mana terdapat kontroversi berkaitan dengan legitimasi sultan dan institusi kesultanan, dan penting karena eksisnya kembali Kesultanan Jailolo di masa kini menggambarkan adanya keberlanjutan historis. Dalam perspektif pariwisata, sejarah dan institusi Kesultanan Jailolo dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya.

B. METODE DAN PENDEKATAN KONSEP

Kajian ini menggunakan metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk, 1985: 32). Sementara konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah konsep sistem politik. Dalam pandangan Gabriel A. Almond dan James S. Coleman, dalam sistem politik terdapat dua komponen penting yakni struktur politik dan budaya politik (Dienaputra & Yuniadi, 2000: 9). Dengan menggunakan konsep sistem politik, dapatlah dibuat suatu hipotesis atau asumsi bahwa dinamika Kesultanan

Jailolo dari 2003 sampai 2017 dipengaruhi oleh struktur dan budaya politik.

C. PEMBAHASAN

1. Status Jailolo Sebelum 2003

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Jailolo merupakan salah satu dari tiga kerajaan Maluku yang tergabung dalam konfederasi Moti tahun 1322 yang kemudian pada perkembangan sejarah dikenal dengan sebutan Moloku Kie Raha. Ketiga kerajaan itu yakni; Ternate, Tidore, dan Bacan (Amal, 2007: 60-62; Djafaar, 2007: 33-37). Selain empat kerajaan tersebut terdapat juga Kerajaan Loloda dan Kerajaan Moro yang tidak terkonfigurasi dalam kesatuan Moloku Kie Raha (Amal, 2007: 203; Mansur, 2013: 63).

Keberadaan Kerajaan Jailolo dalam panggung sejarah Maluku Utara memperlihatkan dinamika politik yang khas. Keadaan ini terekam dalam memori sejarah Maluku Utara, di mana dinamika politik Kesultanan Jailolo mengalami pasang surut dari masa imperialisme bangsa Portugis dan Spanyol, VOC, Inggris, dan Hindia Belanda. Dinamika politik yang pasang surut inilah yang membuat Jailolo pada kurung waktu yang berbeda, berada di bawah kekuatan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore.

Ketika Kerajaan Jailolo diperintah oleh Raja atau Kolano Saubo (1551-1620), Jailolo yang sebelumnya merupakan kerajaan yang kuat, menjadi kerajaan yang lemah. Ia tidak cakap mempertahankan wibawa Kerajaan Jailolo yang selalu mendapat intervensi dari pengaruh Ternate terhadap urusan dalam negerinya. Akhirnya Kolano Saubo tampil sebagai pemimpin yang lemah dalam menghadapi Ternate (Amal, 2007: 36). Padahal pada masa Kolano Katarabumi (1534-1551), Jailolo bisa tampil sebagai kerajaan yang kuat. Setidaknya kerajaan ini bisa mempertahankan eksistensinya dari pengaruh Portugis dan Ternate, bahkan wilayah kekuasaannya bisa meluas sampai ke Tobelo dan Morotai (Amal, 2007: 31-36). Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa Kerajaan Jailolo mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kolano Katarabumi.

Wibawa Kerajaan Jailolo semakin merosot dalam panggung politik Moloku Kie Raha ketika wafatnya Kolano Saubo. Sejak saat itu tidak ada lagi

berkedudukan seorang kolano di Jailolo. Sejak tahun 1620, Jailolo menjadi kerajaan vasal Ternate. Pada perkembangan berikutnya, salah satu Pangeran Jailolo, Kaicil Alam bahkan dijadikan sebagai kerabat Kesultanan Ternate. Ia dipersunting dengan Boki Gamalama, adik Sultan Sibori Amsterdam, Sultan Ternate yang berkuasa saat itu. Tetapi perkawinannya dengan Boki Gamalama berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1684, Kaicil Alam pun tutup usia (Amal, 2007: 36). Kematian Kaicil Alam ini menimbulkan teka-teki, apakah karena jatuh sakit, ataukah dibunuh? Teka-teki ini bisa saja menimbulkan asumsi bahwa Kaicil Alam dibunuh oleh pihak Ternate karena ia ingin kembali memimpin Jailolo bahkan ia menceraikan Boki Gamalama.

Terlepas dari motif kematian Kaicil Alam, fakta sejarah menunjukkan bahwa pasca kematiannya justru membuat Kesultanan Ternate dengan begitu luasnya membangun kekuasaan di Jailolo. Pada saat itulah Jailolo dijadikan sebagai distrik dengan kepala distrik (hoof district) bergelar sangaji yang bertanggung jawab kepada Sultan Ternate (Amal, 2007: 36). Dengan diturunkannya status kesultanan menjadi distrik, maka eksistensi Kerajaan Jailolo pun praktis berakhir. Dalam sejarah, periode ini disebut dengan berakhirnya riwayat Kesultanan Jailolo babak pertama. Status Jailolo sebagai distrik inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore.

Pada masa pemerintahan Sultan Syaifudin Iskandar Zulkarnain dari Tidore (1657-1689), ia pernah mengusulkan kepada Gubernur VOC Maluku Robertus Padbrugge (1677-1682) untuk mengembalikan status Kesultanan Jailolo sebagai salah satu pilar pranata politik Moloku Kie Raha. Akan tetapi usulannya tidak pernah ditanggapi oleh Gubernur Robertus dan Kesultanan Ternate sebagai patner kepercayaan (Amal, 2007: 36-37). Cita-cita Sultan Syaifudin untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo baru terwujud tatkala Sultan Nuku berkuasa (1796-1805). Setelah ia dinobatkan sebagai Sultan Tidore, Seram, dan Papua, Nuku mengeluarkan dekrit pada 1797 yang isinya mengangkat Jogugu (Jojau) atau Perdana Menteri Kesultanan Tidore sebagai Sultan Jailolo dengan gelar Muhammad Arif Billa. Sebelum memangku jabatan Jogugu Tidore, Muhammad Arif Billa pernah memangku jabatan Sangaji Tahane

Makian, sehingga ia juga sering disebut Jogugu Tahane yang artinya jogugu yang berasal dari Tahane (Amal, 2007: 37-38; Leirissa, 1996: 143-144).

Pengangkatan Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo sesungguhnya menimbulkan pro dan kontra antara sebagian orang-orang Alifuru yang lebih memihak pada Kesultanan Ternate, dan sebagian lainnya yang setia kepada Nuku. Kesultanan Ternate dan VOC, pada prinsipnya tidak menyetujui pengangkatan Arif Billa sebagai Sultan Jailolo. Kontra ini terjadi karena mereka memandang bahwa Muhammad Arif Billa tidak memiliki asal-usul keturunan Raja-raja Jailolo (Amal, 2007: 38). Akan tetapi menurut Nuku, bahwa pengangkatan Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo adalah sah. Dalam satu suratnya kepada Gezaghebber Ternate, Nuku menjelaskan bahwa pengangkatan Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo sesungguhnya tidak saja didukung oleh para bobato (penguasa negeri) di Soa-sio Tidore, tetapi juga oleh para bobato di Halmahera Timur (Maba, Weda, dan Patani) dan juga beberapa bobato di Halmahera Utara termasuk Raja Loloda. Karena terjadi penolakan masyarakat Jailolo, maka Muhammad Arif Billa tidak berkedudukan di Jailolo melainkan berkedudukan di Tagalaya (Leirissa, 1996: 154; Amal, 2007: 37). Tagalaya yang dimaksud adalah wilayah antara Toniku dan Kayasa di barat Halmahera.

Dengan pengangkatan Arif Billa sebagai Sultan Jailolo, menunjukkan bahwa secara *de facto*, Kesultanan Jailolo berada di bawah Kesultanan Tidore. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo ternyata tidak berlangsung lama. Setelah Nuku wafat pada tahun 1805, posisi Muhammad Arif Billa juga terancam sehingga mendorong ia beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan Tagalaya mengungsi ke pedalaman Timur Halmahera tepatnya di Distrik Weda, akibat tekanan Pemerintah Kolonial Belanda dan Ternate. Dalam pelarian itu, Muhammad Arif Billa tewas karena terjatuh di sebuah jurang yang sangat berbahaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1807 (Leirissa, 1996: 148; Amal, 2007: 41). Kematian Muhammad Arif Billa meninggalkan jejak makamnya yang oleh masyarakat di sekitar Weda menyebutnya sebagai makam Sultan Jailolo.

Setelah Muhammad Arif Billa wafat, puteranya Kimalaha Sugi

mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Jailolo di hadapan pengikutnya dengan gelar Muhammad Asgar. Akan tetapi ketika Inggris berkuasa di Maluku (1810-1817), Muhammad Asgar tidak diakui sebagai Sultan Jailolo karena ia belum pernah diangkat oleh suatu penguasa yang berhak, dan menurut Inggris, ia tidak berhak menggunakan gelar Sultan Jailolo. Muhammad Asgar kemudian ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ambon (Leirissa, 1996: 149; Amal, 2007: 41).

Setelah diasingkannya Muhammad Asgar ke Ambon, maka dari situlah keluarga dan pengikut Muhammad Asgar kemudian melakukan pengungsian secara besar-besaran ke Ambon. Mereka ingin bergabung dengan Muhammad Asgar yang dianggap sebagai rajanya. Akan tetapi setelah Inggris mengembalikan kekuasaannya kepada Belanda pada 1817, Muhammad Asgar pun kemudian diserahkan kepada Belanda. Dalam masa transisi peralihan kekuasaan itu, Muhammad Asgar meminta kepada panitia pengambil-alihan kekuasaan Belanda terhadap Inggris, agar ia dikembalikan untuk memimpin masyarakatnya di Jailolo Halmahera. Permintaan Muhammad Asgar pun ditolak, bahkan oleh Belanda, ia diasingkan ke Jepara, Jawa Tengah (Amal, 2007: 41; Leirissa, 1996: 198-199).

Dalam pengasingannya di Pulau Jawa, adiknya Hajudin justru mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Jailolo. Hajudin meminta kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengakuinya sebagai Sultan Jailolo. Permintaan untuk mendapat legitimasi sebagai Sultan Jailolo tersebut dilakukan dengan berbagai aksi-aksi dan tekanan terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi permintaannya dalam beberapa kali ditolak oleh pemerintah kolonial, bahkan Hajudin dinyatakan sebagai pembangkang (Leirissa, 1996: 201-202).

Upaya Hajudin untuk mendapat pengakuan sebagai Sultan Jailolo baru membuahkan hasil ketika Piter Merkus menjabat sebagai Gubernur Maluku (1822-1828). Gubernur Piter Merkus mengusulkan agar Kerajaan Jailolo yang diinginkan Hajudin dengan pengikutnya itu, tidak berkedudukan di Jailolo Halmahera, tetapi berkedudukan di suatu lokasi koloni di Seram Pasir atau Seram Utara. Usulan Gubernur Piter Merkus tersebut disambut baik oleh Hajudin, namun dengan bijak Hajudin meminta agar posisi sultan dipegang oleh Muhammad Asgar yang sedang berada dalam pengasingan di Jepara. Atas

usulan itulah, pada 1825 Muhammad Asgar kemudian dipulangkan dari pengasingan di Jawa ke Ambon dan pada 25 Januari 1826, Muhammad Asgar dilantik sebagai Sultan Jailolo yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Kesultanan Jailolo di pengasingan Seram (Leirissa, 1996: 203-204; Amal, 2007: 43).

Sebagai kesultanan yang mendapat legitimasi politik dari Belanda, keberadaan Kesultanan Jailolo di pengasingan Seram ini pun praktis berada di bawah kontrol Pemerintah Kolonial. Ketika Muhammad Asgar meminta agar ia dikembalikan memimpin masyarakatnya di Jailolo Halmahera, ia pun dianggap membangkan karena melanggar kesepakatan yang telah dibangun oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pada 1832, melalui Besluit Pemerintah Kolonial Belanda, Kesultanan Jailolo di pengasingan Seram ini pun dilikuidasi. Muhammad Asgar dan keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur Jawa Barat. Peristiwa inilah yang menandakan berakhirnya riwayat Kesultanan Jailolo babak kedua (Leirissa, 1996: 220-225). Sementara status Jailolo di Halmahera baik pada masa Muhammad Arif Billa maupun Hajudin dan Muhammad Asgar tetap dipandang sebagai sebuah distrik yang bertanggung jawab kepada Kesultanan Ternate. Pada 1868, status Distrik Jailolo dipimpin oleh seorang bergelar Fanyira Jailolo (Amal, 2007: 36).

Belakangan pada 1876, Dano Baba Hasan, seorang kerabat Kesultanan Ternate berupaya untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo. Dano Baba Hasan pernah diangkat sebagai salahakan atau gubernur di Seram pada 1832 oleh Sultan Muhammad Zain dari Ternate. Ia meminta kepada Pemerintah Hindia Belanda agar diakuinya sebagai Sultan Jailolo. Namun lagi-lagi permintaannya tidak pernah mendapat respon positif dari Pemerintah Kolonial Belanda. Karena tidak mendapat respon dari pemerintah kolonial, Dano Baba Hasan pun kemudian melakukan pemberontakan dengan menggalang kekuatan pendukungnya di Halmahera Timur dan Halmahera Utara (Tobelo dan Galela) sebagai tekanan kepada pemerintah kolonial. Akibat pemberontakan itu, Dano Baba Hasan pun dinyatakan statusnya sebagai buron dan pembangkang. Ia akhirnya berhasil ditangkap dan diasingkan ke Pulau Muntok Sumatera (Amal, 2007: 46-48; Latif Doa, 2009).

Upaya untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo pasca pemberontakan Dano Baba Hasan terjadi pada 1914. Pada tahun tersebut, Dano Jaeyudin melakukan percobaan pemberontakan di Weda yang mirip dengan pemberontakan Dano Baba Hasan. Ia adalah seorang yang masih keturunan Dano Baba Hasan yang tinggal di Ambon. Ia menuntut dan memproklamasikan Kesultanan Jailolo, serta mengangkat dirinya sebagai “Yang Dipertuan Agung”. Namun upaya Dano Jaeyudin cepat diredam Pemerintah Kolonial Belanda, dan Dano Jaeyudin pun ditangkap dan dipenjarakan di Ternate (Amal, 2007: 48-49; Latif Doa, 2009).

Dengan ditangkapnya Dano Jaeyudin, maka upaya untuk menghidupkan Kesultanan Jailolo pada awal abad ke-20 pun praktis tidak terwujud. Status Jailolo tetap menjadi sebuah distrik yang berada di bawah Kesultanan Ternate. Status Jailolo sebagai distrik yang berada di bawah Kesultanan Ternate tersebut berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia. Dalam perspektif pemerintahan tradisional, status Jailolo pasca kemerdekaan Indonesia hingga 2002, tetap berada di bawah Kesultanan Ternate. Setidaknya kondisi ini dapat diketahui dari adanya kedudukan Fanyira Jailolo yang berada di bawah Kesultanan Ternate. Adapun Fanyira Jailolo terakhir ketika dihidupkan kembali Kesultanan Jailolo adalah Alham Gafar (Saefudin, wawancara pada 23/11/2018).

2. Dinamika Kesultanan Jailolo Dari 2002 Sampai 2017

Setelah tenggelam dalam dua kali babakan sejarah seperti yang diuraikan di atas, status Kesultanan Jailolo akhirnya dihidupkan kembali untuk melengkapi kesempurnaan nomenklatur Moloku Kie Raha. Kesultanan Ternate adalah yang paling berperan dalam menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo.

Upaya menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo setidaknya dilakukan sejak 2002. Pada tahun ini, Sultan Ternate Mudafar Sjah, melalui beberapa petunjuk tertentu telah menemukan keturunan Sultan Jailolo yang diberi nama Abdullah Sjah (Parada, edisi 1, 2002: 7). Abdullah Sjah pun kemudian diperkenalkan (disinonako) kepada masyarakat Maluku Utara sebelum dinobatkan sebagai Sultan Jailolo pada 2003. Media yang paling gencar memperkenalkan Abdullah Sjah sebagai keturunan Sultan Jailolo adalah “Tabloid Dwi Minggu Parada”. Pada terbitan edisi pertama tanggal 25 Maret sampai 7

April 2002, telah memuat rubrik yang bertajuk “Sultan Jailolo Melengkapi Kesempurnaan Moloku Kie Raha”. Tajuk berita ini pada intinya menggambarkan upaya Sultan Ternate Mudaffar Sjah dalam mencari dan menemukan keturunan Sultan Jailolo yang diberi nama Abdullah Sjah (Parada edisi 01, 2002). Selain memperkenalkan calon sultan, Kesultanan Ternate juga berperan membentuk perangkat Kesultanan Jailolo. Peran ini dilakukan dengan mengorbitkan nama-nama yang duduk dalam Bobato Dunia dan Bobato Akhirat.

Pada minggu pertama bulan Juli 2002, pihak Kesultanan Ternate melakukan sosialisasi tugas dan tanggung jawab kepada Bobato Kesultanan Jailolo yang nanti dilantik. Penyampaian itu dilakukan di Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate oleh Hukum Sangaji (Menteri Luar Negeri) Kesultanan Ternate, Talabudin Yusuf, dan Tuli Lamo (Sekretaris) Kesultanan Ternate Arifin Amirudin, bersama dengan calon Sultan Jailolo, Abdullah Sjah. Penyampaian tugas dan tanggung jawab bobato ini dimaksudkan agar para bobato yang nantinya dilantik pada pertengahan Juli 2002, sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing (Parada edisi 8, 2002).

Setelah melakukan persiapan, pada 22 Juli 2002 dilakukan pelantikan terhadap perangkat (bobato) Kesultanan Jailolo, terutama pada struktur Tau Raha (Komisi Empat). Pelantikan ini dilakukan oleh Sultan Ternate, Mudaffar Sjah bertempat di pelataran Masjid Gamlamo Kecamatan Jailolo. (Parada edisi 10, 2002: 7). Adapun strukturnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Struktur Tau Raha (Komisi Empat) yang dilantik oleh Sultan Mudaffar Sjah

No	Nama	Jabatan
1	Hi. Mahmud Abd. Rahman Kautjil	Jogugu
2	Muhammad Samad	Kapita Lao
3	Ayub A. Wahab	Hukum Gam Malamo
4	Muhammad Ahmad	Hukum Jiko Malamo

Sumber: Parada edisi 10, 2002: 7.

Tau Raha Kesultanan Jailolo yang dilantik di atas kemudian melakukan persiapan untuk upacara penobatan Sultan Jailolo, Abdullah Sjah. Namun, sebelum melakukan persiapan pelantikan, struktur Tau Raha yang dilantik di atas, mengalami perubahan dengan posisi jogugu diamanatkan kepada Drs. Syukur Ali. Akan tetapi Hi. Syukur Ali pun tidak sanggup menerima amanah

jogugu tersebut, sehingga pada Maret 2003, kedudukan jogugu pun diamanatkan oleh Sultan Ternate kepada Gamaludin A. Gafar, dan Tuli Lamo diamanahkan kepada Haerudin Saifudin (Saifudin, wawancara pada 23/11/2018).

Pada perubahan Tau Raha yang ketiga inilah, dilakukan persiapan penobatan Sultan Jailolo. Selama kurang lebih enam bulan melakukan persiapan, akhirnya pada September 2003, Tau Raha Kesultanan Jailolo ini pun berhasil melaksanakan prosesi penobatan Sultan Jailolo, Abdullah Sjah. Inti dari penobatan Sultan Abdullah Sjah ditandai dengan pemasangan Tuala wari (Peci Kolano) oleh Kapita Lao Kesultanan Jailolo, Muhammad Samad. Upacara penobatan Sultan Jailolo tersebut dilaksanakan di Kedaton Sultan Ternate (Saifudin, Wawancara pada 23/11/2018).

Setelah pelantikan di Ternate, Sultan Abdullah Sjah kemudian dibawa ke Jailolo untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Sultan Jailolo. Di Jailolo, Sultan Abdullah Sjah menempati kedaton mini (kadato ici) yang berlokasi di pantai Marimbati.



Gambar 1
Kedaton Mini (Kadato Ici) Sultan Jailolo

Sumber: <http://tonimono.blogspot.com/2010/11/jailolo-kie-raha-part-i.htm>

Kehadiran Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Jailolo terutama yang berhubungan dengan asal-muasal Abdullah Sjah. Kondisi ini menggambarkan suasana yang sama saat Nuku mengangkat Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo pada 1797. Hanya saja perbedaannya dapat dilihat pada pengangkatan Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo, ia mendapat legitimasi politik dari Sultan Tidore (Nuku),

namun dalam pengangkatan Abdullah Sjah, ia mendapat legitimasi dari Sultan Ternate (Mudafar Sjah).

Pada Juni 2006, Sultan Abdullah Sjah kemudian melakukan penataan kembali terhadap struktur bobato Kesultanan Jailolo, terutama pada jabatan Kapita Lao dan struktur Tau Raha. Penataan itu dilakukan karena Jogugu Gamaludin A. Gafur dan Kapita Lao, Muhammad Samad yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Sultan Ternate, mengundurkan diri dari jabatannya. Belum diketahui alasan pengunduran diri dari kedua pejabat penting Kesultanan Jailolo tersebut (Syaifudin dan Lolory, wawancara tanggal 23/11/2018). Adapun Kapita Lao yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Samad digantikan oleh Ilham Dano Toka, sedangkan struktur Tau Raha berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kolano Jailolo, Nomor: 01/SK-KJ/VI/2006, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur Tau Raha (Komisi Empat) Kesultanan Jailolo

No	Nama	Jabatan
1	Haerudin Syaifudin, S.IP	Jogugu
2	Imam Barkah, S.IP., M.Si	Jo Hukum Gammalamo
3	Husain Syaifudin	Jo Hukum Jikomalamo
4	Awad Lolory, SH	Tuli Lamo
Sumber: Arsip Kesultanan Jailolo		

Upaya menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo melalui proses pengangkatan Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo dan pergantian jabatan Kapita Lao dan Tau Raha yang terjadi pasca penobatan sultan (2006), serta adanya pro-kontra kelompok masyarakat Jailolo mengenai asal-muasal Sultan Abdullah Sjah, menggambarkan adanya dinamika dalam institusi Kesultanan Jailolo.

Dalam perspektif politik, dinamika Kesultanan Jailolo dengan pengangkatan Abdullah Sjah sebagai sultannya merupakan sebuah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk hubungan politik. Komponen-komponen itu dibentuk melalui kelembagaan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Jailolo. Hubungan politik ini dapat dilihat dari adanya alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan (Dienaputra & Yuniadi,

2000): 9). Dalam konteks ini, Kesultanan Ternate memiliki otoritas untuk mendistribusikan nilai-nilai otoritas tersebut kepada Kesultanan Jailolo. Dengan perkataan lain, kembalinya Kesultanan Jailolo tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh otoritas Kesultanan Ternate.

Kesultanan Ternate dapat dipahami sebagai suprastruktur politik dan Kesultanan Jailolo sebagai infrastruktur politik dalam konsep struktur politik sebagaimana yang dikatakan Gabriel A. Almond dan James S. Coleman bahwa struktur politik bisa dibedakan atas suprastruktur politik (*political superstructures*) dan infrastruktur politik (*political infrastructure*). Suprastruktur politik merujuk pada struktur politik pemerintah atau sering pula disebut sebagai mesin politik formal. Sebaliknya, infrastruktur politik mengacu pada struktur politik masyarakat atau disebut mesin politik informal (Dienaputra & Yuniadi, 2000: 9). Dikatakan suprastruktur politik, karena Kesultanan Ternate menjadi mesin politik formal yang bekerja atau berperan untuk menghidupkan mesin politik informal yakni Kesultanan Jailolo. Sebagai mesin politik formal, karena Kesultanan Ternate memiliki otoritas yang kuat baik dari pemerintah dan juga masyarakat terutama masyarakat adat di Jailolo.

Otoritas Kesultanan Ternate di atas, dalam ruang politik sejarah mendapat tempat yang sangat penting, karena kedigdayaan menganekasasi Kesultanan Jailolo dan mejadikan Jailolo sebagai *vasalstatnya* sejak 1620. Kewibaaan Jailolo sebagai kesultanan pun menurun status setingkat distrik dibawah yurisdiksi Kesultanan Ternate (Amal, 2007: 36).

Dengan realitas sejarah di atas dapat dikatakan bahwa Kesultanan Ternate memiliki *power full* terhadap Jailolo sehingga secara struktur politik, kebijakan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo di masa kini merupakan upaya pengalokasian nilai-nilai yang bersifat otoritatif serta dipengaruhi oleh penggunaan kekuasaan yang dimilikinya. Otoritas Kesultanan Ternate juga dapat dilihat dari kedudukan Ternate yang utama dalam persekutuan raja-raja Maluku yang tergabung dalam konfederasi Moloku Kie Raha, yakni sebagai *Alam Makolano* (Penguasa Alam Maluku).

Dengan predikat sebagai *Alam Makolano*, Ternate menganggap kedudukannya lebih utama dari kerajaan-kerajaan lain di Maluku, termasuk

Jailolo. Kedudukan Ternate sebagai *Alam Makolano* juga digambarkan oleh VOC dalam laporan serah terima jabatan Gubernur Robertus Padtbrugge (1677-1682) kepada penggantinya, Jacob Lobs (1682-1686). Dalam laporan itu menyebutkan kedudukan Ternate sebagai Kolano Maluku dan juga kedudukan kerajaan-kerajaan lain di Maluku, termasuk Jailolo (Andaya, 2015: 44; Amal, 2007: 2006), yakni:

- Loloda, Ngara ma-beno (Loloda, dinding pintu)
- Jailolo, Jiko Makolano (Jailolo, Penguasa Teluk)
- Tidore, Kie ma-kolano (Tidore, Penguasa Gunung)
- Ternate, Kolano ma-luku (Ternate, Penguasa Maluku)
- Bacan, Dehe ma-kolano (Penguasa, sisih jauh atau daerah ujung).

Kedudukannya sebagai *Alam Makolano* inilah yang dapat dimaknai dalam paradigma budaya politik, bahwa peran Kesultanan Ternate dalam menghidupkan Kesultanan Jailolo pada 2002 lalu, dipahami sebagai suatu pola orientasi yang khusus dari tindakan politik yang sudah tertanam dalam setiap sistem politik menurut pandangan Gabriel A. Almond. Dalam konteks ini, Jailolo dipahami sebagai sistem politik Kesultanan Ternate, lebih-lebih ketika Kesultanan Ternate memandang bahwa Jailolo telah dianeksasi sejak 1620 dan menjadikan status Jailolo sebagai distrik di bawah otoritasnya. Dalam teori pusat-pinggiran, Ternate adalah pusatnya, dan daerah-daerah taklukan, termasuk Jailolo dan Loloda adalah pinggirannya. Dalam konteks ini, Jailolo (termasuk Loloda) telah mengakui Ternate sebagai pusatnya (Andaya, 2015: 38-119).



Gambar 2. Sultan Abdullah Syah pada saat penobatan

Sumber: Latif Doa, 2009.

Pengaruh Kesultanan Ternate terhadap Kesultanan Jailolo mengalami dinamika baru pada 2010. Pada tahun ini, berlangsung tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Dalam suasana politik tersebut, Sultan Ternate Mudaffar Sjah menggunakan otoritas tradisional dan kharismanya, melakukan pelantikan tokoh adat di Jailolo, yakni Hendra Kariangan sebagai *Sangaji Malamo* dan Jainudin Abdullah sebagai *Kapita Malamo*. Keduanya adalah pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Demokrat. Pelantikan kedua tokoh adat tersebut menimbulkan kontroversi di internal Kesultanan Jailolo.

Kontroversi di atas terlihat dari respon Sultan Jailolo Abdullah Sjah yang mengatakan bahwa pelantikan kedua tokoh adat yang dilakukan oleh Sultan Ternate tersebut, dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap internal Kesultanan Jailolo. Menurutnya, Sultan Mudaffar Sjah tidak pernah membangun koordinasi dengan Kesultanan Jailolo, sehingga Sultan Abdullah Sjah merasa tersinggung dengan kehadiran Sultan Ternate di Jailolo untuk melantik dua tokoh adat tersebut dalam wilayah Kesultanan Jailolo (Mansur, 2011:)

Pernyataan Sultan Abdullah Sjah tersebut direspon oleh Sultan Ternate dengan pengnonaktifan beliau (Abdullah Sjah) sebagai Sultan Jailolo dan mengangkat Kapita Lao Kesultanan Jailolo, Ilham Dano Toka sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sultan Jailolo (Malut Post, Edisi 22 November 2010: 1). Pemberhentian Abdullah Sjah dituangkan dalam Keputusan Kolano Moloku Kie Raha Nomor: 177/SKEP-MKR/XI/2010. Keputusan yang ditandatangani oleh Sultan Ternate, Mudaffar Sjah itu memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara Abdullah Sjah sebagai Wakil Sultan Ternate di Jailolo (<https://kesultananjailolo.wordpress.com/author/kesultananjailolo/>).

Pemecatan yang dilakukan oleh Sultan Ternate sebagaimana yang digambarkan di atas tidak diakui oleh Abdullah Sjah beserta *bobato* yang pro padanya, dan menganggap bahwa Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo sudah sesuai dengan hukum adat Kesultanan Jailolo. Kondisi ini tergambar dari terciptanya dualisme kepemimpinan Kesultanan Jailolo antara Sultan Abdullah Sjah dan Plt. Sultan Jailolo, Ilham Dano Toka. Dalam konteks ini, Sultan Abdullah Sjah masih dianggap berfungsi, setidaknya dapat dilihat dari *bobato* dan

kelompok masyarakat adat yang mendukungnya. Selain itu, Sultan Abdullah Sjah pun memecat Ilham Dano Toka sebagai Kapita Lao dan mengangkat Imrat Idrus sebagai Kapita Lao yang baru.

Eksistensi Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo dapat juga dilihat ketika peresmian Kedaton Kesultanan Jailolo yang dilakukan melalui prosesi adat yang disebut "*Jo Ou Wosa Kadato*" pada 23 Desember 2013. Dalam konteks ini, Sultan Abdullah Sjahlah yang menduduki kedaton tersebut. Bahkan dalam peresmian kedaton tersebut, juga hadir perwakilan dari Kesultanan Bacan, Tidore, dan Jogugu Loloda. Selain itu, Bupati, Ketua DPRD, dan Unsur FORKOMPINDA Kabupaten Halmahera Barat pun turut hadir (Dokumentasi kegiatan peresmian).

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam upacara peresmian Kedaton Kesultanan Jailolo tersebut menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap eksistensi Kesultanan Jailolo secara kelembagaan dengan kepemimpinan Sultan Abdullah Sjah. Dukungan itu juga terlihat dari momen Festival Teluk Jailolo (FTJ) yang dilaksanakan setiap tahun antara bulan April dan Mei. Dalam momen ini, panitia selalu mengundang Sultan Abdullah Sjah dan perangkat *bobatonya*.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terhadap eksistensi Kesultanan Jailolo dengan kepemimpinan Sultan Abdullah Sjah semakin kuat ketika "Dani Misi" terpilih dan dilantik sebagai Bupati pada 2014. Kondisi ini tergambar dari masuknya Bupati Halmahera Barat "Danni Misi" sebagai unsur *bobato* Kesultanan Jailolo dengan jabatan adat bergelar "Kimalaha Jailolo". Pada masa pemerintahan Bupati Dani Misi, momen Festival Teluk Jailolo yang dilaksanakan setiap tahun tersebut, senantiasa melibatkan pihak Kesultanan Jailolo sebagai bagian dari penyelenggara. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari undangan untuk menghadiri acara pembukaan Festival Teluk Jailolo pada 2017, mencantumkan jabatan Bupati Halmahera Barat dan Sultan Jailolo sebagai pihak yang mengundang. Sultan Jailolo yang dimaksud dalam undangan itu adalah Abdullah sjah (Arsip Kesultanan Jailolo).

Realitas politik di atas merupakan penggambaran atas citra Kesultanan Ternate dan Kesultanan Jailolo. Dalam konteks ini, citra kedua institusi adat

tersebut mengalami degradasi dalam perspektif otoritas dan legitimasi. Kesultanan Ternate dengan otoritas politik tradisional sebagai *Alam Makolano* mengalami degradasi dengan rendah atau berkurangnya legitimasi dari sebagian kelompok masyarakat adat dan *bobato* Kesultanan Jailolo yang tidak mengakui penonaktifan Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo yang dilakukan oleh Sultan Ternate, Mudaffar Sjah. Bahkan dukungan terhadap Sultan Abdullah Sjah pun datang dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga dukungan tersebut menggambarkan legitimasi tradisional dari Sultan Ternate Mudaffar Sjah pun cenderung berkurang.

Sebaliknya legitimasi Sultan Jailolo Abdullah Sjah juga mengalami degradasi. Setidaknya kondisi ini dapat tergambar dari legitimasi Abdullah Sjah tidak lagi diakui oleh Kesultanan Ternate. Selain itu, terdapat pula kelompok masyarakat adat yang lain di Jailolo yang tidak lagi mengakui eksistensi Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo. Dalam konteks ini, legitimasi mereka dapat dikatakan lebih berorientasi pada sosok Sultan Ternate, Mudaffar Sjah.

Upaya Abdullah Sjah bersama pendukungnya yang tetap mempertahankan kedudukan sultan dan menempati Kedaton Kesultanan Jailolo, ditantang oleh pihak Kesultanan Ternate dan Ilham Dona Toka sebagai Plt. Sultan Jailolo bersama pendukungnya. Kondisi ini dapat dilihat ketika Abdullah Sjah dan pendukungnya merencanakan menempati Kedaton Kesultanan Jailolo yang dibangun oleh pemerintah melalui momentum peresmian kedaton (*Jo Ou Wosa Kadato*) pada 23 Desember 2013, direspon oleh pihak Kesultanan Ternate dengan melaporkan tindakan Abdullah Sjah dan pendukungnya kepada Kapolres Halmahera Barat sebagai perbuatan melanggar adat seotarang.

Laporan pengaduan di atas dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Sultan Mudaffar Sjah Nomor 293/MKR-KT/XI/2013. Dalam isi surat tersebut, juga berisi penugasan Sultan Ternate kepada Sdr. Muhammad Samad dan Sdr. Ilham Dano Toka sebagai Jogugu dan Kapita Lao Kesultanan Jailolo yang baru dalam rangka melestarikan dan mengembangkan adat se atorang (<https://kesultananjailolo.wordpress.com/author/kesultananjailolo/>).

Laporan pengaduan yang dilayangkan oleh pihak Kesultanan Ternate (tentunya didukung oleh Ilham Dano Toka selaku Plt. Sultan Jailolo dan

pendukungnya), tidak mengurungkan rencana Abdullah Sjah dan pendukungnya untuk melaksanakan acara peresmian kedaton (*Jo Ou Wosa Kadato*). Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan tersebut. Bahkan pihak POLRES Halmahera Barat tidak terlihat menghentikan acara tersebut, dan sebaliknya pihak POLRES juga turut hadir dan mengamankan berlangsungnya acara peresmian kedaton tersebut.¹

Pada 17 November 2015, perangkat Kesultanan Jailolo versus Muhammad Samad sebagai Jogugu dan Ilham Dano Toka sebagai Kapita Lao, mengeluarkan maklumat yang isinya menegaskan bahwa status Abdullah Sjah hanyalah Wakil Sultan Ternate di Jailolo yang telah berkahir dengan dicabutnya mandat tersebut oleh pemberi mandat yakni Sultan Ternate. Kelompok masyarakat adat ini menganggap bahwa keberadaan Abdullah Sjah sebagai mantan Wakil Sultan Ternate di Jailolo yang menempati Kedaton Kesultanan Jailolo sebagai perbuatan melanggar hukum, baik hukum positif maupun hukum adat (<http://pandji-indonesia.com/2017/10/30>).

Dengan dalil menjunjung martabat Kesultanan Jailolo sebagaimana yang diungkapkan dalam maklumat di atas, perangkat Kesultanan Jailolo versus Muhammad Samad sebagai jogugu kemudian melaksanakan konsolidasi untuk mengangkat Sultan Jailolo yang mereka percaya sesuai dengan zuriat (asal-usul keturunan) yang sebenarnya. Adapun figur yang dipercaya sesuai zuriat adalah Hi. Muhammad Siddik Kautjil. Ia adalah anak dari Almarhum Hi. Mahmud Abd. Rahman Kautjil (mantan Jogugu Jailolo). Dengan pertimbangan itulah, maka pada 27 November 2015, dilaksanakan prosesi pelantikan Hi. Muhammad Sidik Kautjil sebagai Sultan Jailolo. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Ngaralamo Ternate yang juga dihadiri oleh unsur Kesultanan Ternate (<https://kesultananjailolo.wordpress.com>).

¹ Terlaksana acara penggunaan kedaton Kesultanan Jailolo pada tanggal 23 Desember 2013 diketahui oleh peneliti karena peneliti juga hadir dan menyaksikan acara tersebut. Pada saat itu, sekelompok masa dari kubu PIt. Sultan Jailolo melakukan aksi memprotes berlangsung acara.



Dari rangkaian peristiwa yang digambarkan di atas, memperlihatkan dinamika Kesultanan Jailolo yang sangat kontroversial. Kontroversi itu semakin berkembang ketika Sultan Abdullah Sjah tutup usia pada 23 Oktober 2017 (<http://tribratanews.polri.go.id/?p=277503>). Pada sambutan pelepasan jenazah Almarhum Sultan Abdullah Sjah, Jogugu Haerudin Saefudin menyampaikan bahwa wafatnya Sultan Abdullah Sjah bukan berarti akan berakhir pula Sultan Jailolo. Pihak Tau Raha telah melaksanakan rapat terbatas dan memutuskan akan mengangkat putera tunggal Almarhum yakni Rosenu Heru Prawoto sebagai Sultan Jailolo yang baru. Dalam masa transisi itu, Tau Raha juga telah memutuskan dirinya selaku jogugu untuk menjalankan sementara roda pemerintahan Kesultanan Jailolo sampai pada pelantikan Sultan Jailolo yang baru (<http://indotimur.com/nasional/sultan-jailolo-wafat-di-usia-104-tahun>).

Pernyataan Jogugu Haerudin Saefudin ini kemudian direspon oleh Sultan Muhammad Siddik yang mengatakan bahwa Almarhum Abdullah Sjah itu hanyalah Wakil Sultan Ternate di Jailolo yang mandatnya telah dicabut oleh Almarhum Sultan Ternate, Hi. Mudaffar Sjah. Oleh karena itu, Abdullah Sjah hanyalah berkedudukan sebagai Mahimo. Dengan demikian maka rencana penobatan Rosenu Heru Prawoto sebagai Sultan Jailolo adalah kesalahan besar. Muhammad Sidik mengklaim bahwa dirinya adalah Sultan Jailolo yang sah berdasarkan garis keturunan Sultan Jailolo (<http://pandji-indonesia.com/2017/10/30>)

Meskipun terjadi penolakan dari kubu Sultan Muhammad Sidik, namun pelantikan terhadap putera tunggal Almarhum Sultan Abdullah Sjah tetap dilaksanakan. Rosenu Heru Prawoto dianggap memiliki zuriat melalui ayahnya yang dicari oleh Almarhum Sultan Ternate, Mudaffar Syah (<http://pandji-indonesia.com/2017/10/30>).

Pada 9 November 2017, bertempat di Kedaton Kesultanan Jailolo Rosenu Heru Prawoto dinobatkan sebagai Sultan Jailolo dengan memakai nama Ahmad Hi. Abdullah Sjah. Upacara penobatan tersebut dihadiri oleh FORKOMPINDA Kabupaten Halmahera Barat, perwakilan yang mengatasnamakan Kesultanan Bacan, Tuli Lamo Kerajaan Loloda. Selain itu, penobatan Ahmad Abdullah Sjah sebagai Sultan Jailolo juga dihadiri oleh Koordinator Forum Silaturrahi Keraton Nusantara (FSKN) wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Firman Mudaffar Sjah (<https://www.suaramu.co/2017/11>).



Gambar 4. Sultan Ahmad Abdullah Syah

Sumber: <https://www.suaramu.co/2017/11>

Dinamika Kesultanan Jailolo sebagaimana digambarkan di atas, memperlihatkan pola kepemimpinan dan kelembagaan di Kesultanan Jailolo berorientasi pada sentiment emosional masing-masing pihak. Kondisi ini tergambar dari saling mengkalim atas hak singgasana Kesultanan Jailolo. Polemik ini juga telah menciptakan masyarakat terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan dua kelompok masyarakat berdampak pada orientasi kepatuhan

terhadap otoritas dan legitimasi terhadap eksistensi sultan sebagai pemimpin tradisional di masa kini.

3. Hubungan Geneologis dari Ketiga Sultan Jailolo di Masa Kini (2002-2017)

Dinamika sosial politik Kesultanan Jailolo yang digambarkan di atas cenderung berorientasi pada legitimasi geneologis sebagai ahli waris Kesultanan Jailolo. Para sultan pada periode yang dibahas ini mengklaim hak kepemilikan yang sah atas singgasana Kesultanan Jailolo. Oleh karena itu pada bagian ini penting membahas hubungan geneologis para Sultan Jailolo yang dibahas dalam periode (2002-2017) dengan para Sultan Jailolo terdahulu.

Berdasarkan tradisi oral yang masih hidup pada masyarakat tertentu di Maluku Utara terutama di Jailolo, mengabadikan nama Darajat sebagai Raja Jailolo di masa awal. Nama Darajat ini juga dikultuskan dalam Hikayat Ternate yang ditulis oleh Naida pada paroh kedua abad 19. Dalam hikayat tersebut menggambarkan bahwa Darajat adalah salah putera dari tiga putera seorang ulama bernama Jafar Shadiq dari negeri Arab yang menikah dengan seorang puteri dari kayangan bernama Siti Nursifa. Ia adalah putera kedua dari Jafar Sadik yang menjadi raja pertama di Jailolo. Adapun ketiga anak yang lain adalah yang tertua Buka yang menjadi raja pertama di Bacan, ketiga Sahadjati yang menjadi raja pertama di Tidore, dan keempat Mashur Malamo yang menjadi raja pertama di Ternate (Surjo, 2005: 122-123; Jafaar, 2005: 18). Versi inilah selalu dikenang dengan Tarian Tujuh Puteri, di mana Nur Sifa adalah satu dari tujuh puteri yang turun dari kayangan dan menikah dengan Jafar Shadiq.

Dalam versi Bacan, Jafar Sadek mempunyai empat anak laki-laki dan empat anak perempuan, di mana seorang anak laki-laki yang kedua bernama Ahmad Sani yang mendirikan dan menjadi Raja Jailolo. Adapun anak laki-laki yang lain adalah: Said Muhammad Bakir sebagai anak tertua yang mendirikan dan menjadi raja pertama di Bacan; Said Muhammad Nukil sebagai anak ketiga yang mendirikan dan menjadi raja pertama di Tidore; dan Said Muhammad Nursaffar sebagai putera bungsu yang mendirikan dan menjadi raja pertama di Ternate. Sementara keempat anak perempuan yakni: Boki Sadarnawi yang menjadi induk raja-raja di Tobungku; Boki Saharnawi yang menjadi induk raja-

raja di Banggai; Boki Sagarnawi yang menjadi induk raja-raja di Loloda; dan Boki Siti Dewa (Amal, 2007: 21-22).

Dalam versi yang berbeda seperti yang dicatat oleh Antonio Galvao menggambarkan bahwa asal-usul raja-raja Maluku berasal dari empat bersaudara yang lahir dari tiga lelaki dan seorang perempuan. Masing-masing menjadi cikal bakal raja di Bacan, Papua, Buton, dan Banggai. Sementara sang puteri menjadi Permaisuri Raja Loloda (Lapian, 1994: 4; Atma Duana, 2011: 43). Versi ini justru tidak mencantumkan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Tidak dijelaskan dari mana asal-usul ketiga raja tersebut. Namun, eksistensi Ternate dan Tidore sebagai kerajaan pada masa itu menjadi penting dalam konteks kekuasaan di Maluku. Sementara Jailolo oleh Antonio Galvao, tidak memasukkannya ke dalam *Kings of Maluku* (Lerissa, 1999: 35).

Versi Antonio Galvao di atas juga berbeda dengan versi yang ditulis oleh Collhass dalam "Kroniek van het Rijk Batjan". Dalam kronik itu dikisahkan bahwa Sultan Bacan yang pertama Said Muhammad Al-bakir bin Jafar Shadik yang bergelar Sri Maha Raja bertakhta di Bukit Sigara yang dalam perkawinannya dengan Boki Topowo dari Galela, mendapatkan tujuh putera-puteri. Disebutkan suatu ketika terjadi banjir besar, semua anak raja hanyut dibawah air bah termasuk Kaicil Komalo Besy (putera bungsu) yang terdampar di utara Halmahera dan kemudian menjadi raja di Loloda (Leirissa, 1999: 31; Djafaar, 2007: 33-36; Atma Djuana, 2011: 43). Versi ini juga tidak mencantumkan Jailolo.

Versi lain menyebutkan bahwa Raja Jailolo pertama adalah seorang wanita yang menikah dengan Raja Loloda. Perkawinan antara Ratu Jailolo dan Raja Loloda merupakan perkawinan politik untuk memberikan akses kepada Jailolo menguasai seluruh Halmahera (Amal, 2007: 25).

Dari beberapa versi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa asal-muasal Raja Jailolo di masa awal belumlah jelas, bahkan menimbulkan kontroversi. Hal ini dapatlah dipahami karena beberapa versi di atas menggambarkan asal-muasal Raja Jailolo dengan perspektif mitologi. Dalam historiografi tradisional, mitos merupakan pemikiran untuk menggambarkan masa pertumbuhan kerajaan, mengingat sumber-sumber sejarah yang dapat dipercaya kebanyakan berasal dari masa kemudian (Lubis, 2011: 75).

Pada masa kemudian untuk menelusuri eksistensi para raja atau sultan di Jailolo dapat ditelusuri berdasarkan deskripsi mengenai status Jailolo sebelum 2002. Dari deskripsi di atas, terdapat dua garis geneologis sultan. Pertama, berdasarkan garis Kolano Saubo dan kedua berdasarkan garis Sultan Muhammad Asgar dan Hajudin.

Para Sultan Jailolo pada 2002 sampai 2017 mengklaim memiliki zuriat dengan sultan-sultan terdahulu tersebut. Abdullah Sjah yang diorbitkan pada 2002 dan dinobatkan pada 2003, mengklaim memiliki zuriat dengan Sultan Muhammad Asgar dan Hajudin yang diasingkan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Ciancur Jawa Barat pada 1832. Muhammad Asgar dan Hajudin merupakan anak dari Muhammad Arif Billah yang dilantik oleh Sultan Nuku sebagai Sultan Jailolo pada 1797. Sebelum diangkat sebagai Sultan Jailolo, Muhammad Arif Billa adalah seorang Sangaji di Tahane Makian yang diangkat menjadi *jogugu (jojau)* di Tidore selama 13 tahun. Berdasarkan silsilah versi Abdullah Sjah, Muhammad Arif Billa adalah keturunan ke-7 dari Prins Gugu Alam. Prins Gugu Alam adalah adik bungsu dari Sultan Doa dan Prins Parenta. Ketiganya adalah anak daripada Sultan Yusuf yang memerintah di Jailolo pada 1500-an (Arsip Kesultanan Jailolo)

Menurut Leirissa (1996: 143-157), Muhammad Arif Billah bukan golongan bangsawan, tetapi oleh Nuku, ia diberi gelar dan simbol kebangsawan agar ia mendapat legitimasi sebagai Sultan Jailolo. Sebagian bangsawan di Tidore tidak mengakui kebangsawanan Muhammad Arif Billa.

Selain itu, penting juga dilihat bahwa kehadiran Abdullah Sjah di Jailolo ternyata bukan orang baru. Sejak tahun 1959, ia pernah bertugas di Jailolo selaku Komandan PUTERPRA yang sekarang berganti nama menjadi KORAMIL.

Akan tetapi terlepas dari kontroversi asal-muasal Abdullah Sjah di atas, realitas menunjukkan bahwa ia dilantik sebagai Sultan Jailolo pada tahun 2003 lalu. Legitimasi inilah yang kemudian membuat para perangkat Kesultanan Jailolo kemudian mengangkat anaknya yakni Rosenu Heru Prawoto sebagai Sultan Jailolo yang baru menggantikan ayahnya.

Adapun Sultan Muhammad Siddik Kautjil menganggap dirinya sebagai ahli waris yang sah sebagai Sultan Jailolo karena meyakini bahwa dirinya adalah keturunan dari Kaicil Alam, seorang pangeran Jailolo yang dinikahi dengan Boki Gamalama Ternate, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya (Muhammad Sidik, wawancara pada Maret 2016). Selain itu ada juga versi yang menghubungkan zuriat Sultan Muhammad Sidik dengan Sultan Yusuf (<https://kesultananjailolo.wordpress.com>).

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa para Sultan Jailolo yang mengklaim memiliki zuriat dengan sultan-sultan terdahulu itu benar, maka secara geneologis mereka memiliki legitimasi atas singgasana Kesultanan Jailolo. Namun secara *defacto* dan *de jure* pun harus mendapat legitimasi yang kuat baik dari pendukungnya (rakyat) maupun dari otoritas yang memberikan legitimasi.

D. PENUTUP

Dinamika sosial-politik Kesultanan Jailolo dari 2002 sampai 2017 cenderung lebih berorientasi pada masalah legitimasi geneologis para sultan, di mana masing-masing mengklaim kepemilikan yang sah atas singgasana Kesultanan Jailolo. Dinamika ini juga telah melahirkan terbentuknya dua kelompok masyarakat adat di Jailolo sebagai pendukungnya. Dua kelompok masyarakat pendukung ini membangun solidaritas emosional dan sosial untuk mempertahankan legitimasi yang mereka yakini sebagai kebenaran.

Terdapat dua garis hubungan geneologis dengan para sultan terdahulu yang diyakininya, yaitu garis Sultan Doa dan garis Sultan Muhammad Arif Billah. Kedua garis itu berinduk pada Sultan Yusuf. Dengan demikian, secara geneologis, jika itu benar, dapat dikatakan dua versi ini memiliki legitimasi atas singgasana Kesultanan Jailolo. Akan tetapi perlu didukung oleh legitimasi rakyat dan pemerintah setempat.

Kontroversi mengenai status Sultan Jailolo di masa kini sesungguhnya menggambarkan fenomena yang relatif sama ketika Sultan Nuku mengangkat Arif Billah sebagai Sultan Jailolo pada 1796. Demikian juga dengan pengganti

Muhammad Arif Billa, yakni Sultan Muhammad Asgar dan Sultan Muda Hajudin yang diasingkan ke Cianjur Jawa Barat pada 1832.

Kesultanan Ternate yang berperan penting dalam menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo turut mewarnai dinamika sosial-politik di Kesultanan Jailolo. Hal ini tergambar dari sikap pro dan kontra terhadap salah satu versi dan kelompok pendukung Sultan Jailolo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dienaputra, R.D, dan Yuniadi, A. 2000. *Perubahan Sosial Politik Cianjur (1816-1942)*. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Kusnanto, dkk. 2010. *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate*. Laporan Penelitian. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Mansur, Mustafa. 2011. "Memahami Eksistensi Sultan versus Kolano; Studi Perbandingan dalam Sejarah Maluku Utara". *Harian Mimbar Malut*, 28 Februari 2011, hlm. 5.
- 2013. "Transformasi Politik di Loloda Maluku Utara (1808-1945) Arsip Kesultanan Jailolo tahun 2007

Buku

- Amal, M.A. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara*. Edisi Revisi. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Andaya, L.Y. 1993. *The World of Maluku; Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Djafaar, I.A. 2005. *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal Biografi Politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Djafaar, I.A. 2007. *Jejak Portugis di Maluku Utara*. Jakarta: Ombak.
- Gottschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugorocho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hasan, A.H. 2001. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Herlina, N. 2009. *Historiografi Indonesia dan Permasalahannya*. Bandung: Satya Historika.
- Leirissa, R.Z. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan Sekitar Laut Seram Abad ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maksudi, B.I. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surat Kabar

- Harian Malut Post, edisi 22 November 2010
- Tabloid Parada Edisi 01, 25 Maret – 27 April 2002
- Tabloid Parada Edisi 08, 01-14 Juli 2002
- Tabloid Parada, Edisi 10, 29 Juli – 11 Agustus 2002.

Sumber Internet

Latif Doa, Busranto 2009. Menelusuri Jejak-Jejak Sejarah Kesultanan Jailolo di Pulau Halmahera, diakses pada <https://ternate.wordpress.com/.../the-hidden-history-of-jailolo-menelusuri-jejak-jejak->

Gambar Kedaton Mini Kesultanan Jailolo, diakses pada <http://tonimono.blogspot.com/2010/11/jailolo-kie-raha-part-i.htm>

<https://kesultananjailolo.wordpress.com/author/kesultananjailolo/>

<https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku/sultan-van-jailolo/>

<http://pandji-indonesia.com/2017/10/30/sultan-jailolo-yang-sah-masih-hidup/>

<http://tribratanews.polri.go.id/?p=277503>

<http://indotimur.com/nasional/sultan-jailolo-wafat-di-usia-104-tahun>

https://www.suaramu.co/2017/11/ahmad-sjah-dinobatkan-sebagai-sultanjailolo/#.XB_kKbgrdH0